

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. (PASK, 2015 : 1).

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2015: 105) “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan tersebut berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan

2.1.2 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016 :13) mendefinisikan laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan social, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 21) tentang laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah yaitu

suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Ramli (2016: 5) laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Secara umum para pengguna laporan keuangan social public memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, social dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber- sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya.

2.1.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 10ating10c.

2. Manajemen

Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

4. Keseimbangan

Antargenerasi (Intergenerational equity) membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan 10ating diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.2.2 Bentuk Laporan Keuangan Daerah

Adapun bentuk-bentuk laporan keuangan daerah menurut Direktorat Jendral Pajak dan Keuangan (DJPK) tahun 2018 adalah sebagai berikut ini :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi APBD disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD. Laporan Realisasi APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (DJPK Kemenkeu, 2015).

Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut.

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus atau defisit;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan netto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih, dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau

kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

Adapun definisi masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi bukan merupakan operasi biasa

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Neraca

Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi kas terkait aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari 4 aktivitas:

- a. Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasional pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber pendanaan sendiri (tidak mengandalkan pihak luar). Misalnya penerimaan

pendapatan pemerintah dan pembayaran belanja operasional pemerintah (pegawai, subsidi dll).

- b. Aktivitas investasi menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas sebagai akibat dari perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi pemerintah, misalnya aset dan instrumen investasi.
- c. Aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sebagai akibat dari pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memperkirakan hak tagih pemerintah terhadap pihak lain dan hak tagih pihak lain terhadap pemerintah dimasa depan. Misalnya adalah penerimaan dan pembayaran pinjaman.
- d. Aktivitas transitoris menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja, dan pembiayaan pemerintah. Misalnya adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.
- d. Kebijakan akuntansi yang penting berupa entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan dan kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e. Penjelasan pos-pos laporan keuangan berupa rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

2.1.3 Analisis Rasio

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Menurut Halim (2016) rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ektern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipas masyarakat dalam pembangunan daerah.

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipai masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.1 Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	instruktif
Rendah	25%-50%	konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Abdul halim(2016)

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio efektifitas

Rasio efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim,2016). Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja dengan anggaran daerah (Mahmudi, 2017). Rasio efisiensi ini digunakan untuk digunakan mengukur tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio ini tidak absolut, tetapi relative. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik menurut rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. (Mahmudi, 2017 : 152). Namun tingkat efisiensi keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila mengimbangi tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan.

Rasio efisiensi erat kaitannya dengan tingkat pertumbuhan pendapatan arti daerah, sehingga perhitungan rasio efisiensi perlu dilakukan untuk memastikan hasil analisis pertumbuhan sudah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah berjalan dengan maksimal. Menurut Halim (2016) Rasio efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun menurut Halim (2016) rumus dari rasio aktivitas yaitu :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Belum ada tolak ukur yang pasti untuk menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan yang menilai seberapa mampu pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi serta memperbaiki capaian-capaian yang sudah baik dan yang belum optimal dari satu periode ke periode berikutnya. Pentingnya pemahaman tentang rasio pertumbuhan untuk setiap komponen sumber pendapatan dan pengeluaran ini adalah untuk menilai potensi dan hasil yang telah dicapai sehingga kedepan membutuhkan perhatian dan tindak lanjut (Halim, 2007). Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } (X_n - (X_{n-1}))}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Pertumbuhan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Pertumbuhan (%)
Rendah Sekali	0-10%
Rendah	11%-20%
Sedang	21%-30%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber: Dajan dalam Jurnal (Utomo, 2017)

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2). Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian *performance*. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah 35 terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (hendro sumarjo, 2010). Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Agustina, 2013).

1. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Widodo (Halim, 2002 : 126) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk :

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

2. Tahap-tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Fahmi (2011:3) mengemukakan bahwa ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan yaitu:

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
- b. Melakukan perhitungan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.
- d. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun alat analisis dan objek yang digunakan sama tetapi objek dan periode waktu yang digunakan berbeda sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut adalah ringkasan penelitian sebelumnya yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang (Tahun)	Judul Tulisan	Teknik Analisis	Hasil
1	Farida, dkk (2019)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	Menggunakan analisis rasio : 2.3 Rasio efektivitas 2.4 Rasio efisiensi 2.5 Rasio kemandirian keuangan daerah 2.6 Rasio pertumbuhan	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang dalam hal Rasio kemandirian menunjukkan bahwa Kabupaten Subang sangat mandiri, karena rata-rata 17,1% Rasio kerukunan Pemerintah Kabupaten Subang lebih cenderung

			2.7 Rasio aktivitas	<p>memprioritaskan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Biaya operasional yang besar rata-rata sebesar 73,75%. Sementara untuk belanja modal rata-rata 21,75%</p> <p>rasio pertumbuhan dapat dikatakan masih sangat rendah, karena rata-rata adalah 8,6%</p> <p>Efisiensi rasio pendapatan daerah dapat dikatakan tidak efisien, karena rata-rata tingkat efisiensi 63,3%</p> <p>Rasio efektivitas pendapatan asli Daerah Kabupaten Subang telah efektif, karena efektivitas rata-rata di atas 100% yaitu 113,8%.</p>
2.	Supriadi (2016)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Kota Tangerang	Menggunakan analisis rasio : rasio kemandirian keuangan daerah rasio pertumbuhan	<p>Hasil penelitian Tahun Anggaran 2007 hingga 2014 dapat menjelaskan:</p> <p>Rasio kemandirian keuangan wilayah Kota Tangerang berkisar antara 20% hingga 68%. tingkat pertumbuhan (PAD) Kota Tangerang berkisar antara 09% hingga 45%,</p> <p>Maka, dapat disimpulkan sesuai dengan hipotesis laporan keuangan kota Tangerang sangat baik.</p>
3.	Anshori (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun	Analisis rasio keuangan Pemerintah daerah Derajat desentralisasi	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasikan PAD dan pajak daerah tergolong efisien, karena dengan biaya yang relatif sedikit

		Anggaran 2016 – 2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan)	Rasio ketergantungan keuangan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Rasio efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Rasio Efisiensi Belanja	Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun demikian tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi.
4.	Rahayu (2017)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPPA Kabupaten Trenggalek tahun 2012 s.d 2015)	Menggunakan analisis rasio: Rasio kemandirian Rasio efektivitas, Rasio efisien, Rasio aktivitas Rasio pertumbuhan	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dilihat dari Rasio kemandirian daerah sangat baik dalam menjalankan tugas – tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan, karena hasil rata – rata kemandiriannya sebesar 245,61%. Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, karena hasil rata – rata efektivitasnya 99,20%, Rasio Efisiensi daerah tergolong Sangat Efisien karena rata – rata besarnya rasio ini sebesar 1,04%. Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk

				<p>belanja operasi daerah rata-rata yaitu sebesar 85,33 dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 14,64%.</p> <p>Rasio Pertumbuhan PAD, Belanja Operasi, belanja pertumbuhan, hasil rata – rata menunjukkan pertumbuhan positif yang artinya sangat baik</p>
5.	Ramadhan (2018)	Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat	Menggunkan teknik analisis rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	<p>Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dari segi Kemandirian masih rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 19,65%, sedangkan dari segi Efektivitas dinilai sudah cukup efektif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 96,84%, dan dari segi Pertumbuhan juga sudah positif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 13,87%.</p>
6.	Pramono (2016)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Analisis rasio tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian dan pertumbuhan.	<p>Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah:</p> <p>Aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011), rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90%</p>

				<p>(2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011).</p> <p>Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011).</p> <p>Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%.</p> <p>Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).</p>
7	Lianto (2018)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (Bppkad) Di Kota Surakarta	Teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktifitas, Rasio Pertumbuhan.	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari :</p> <p>Rasio kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif</p> <p>Rasio efektifitas PAD efektifitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluaskan sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah</p>

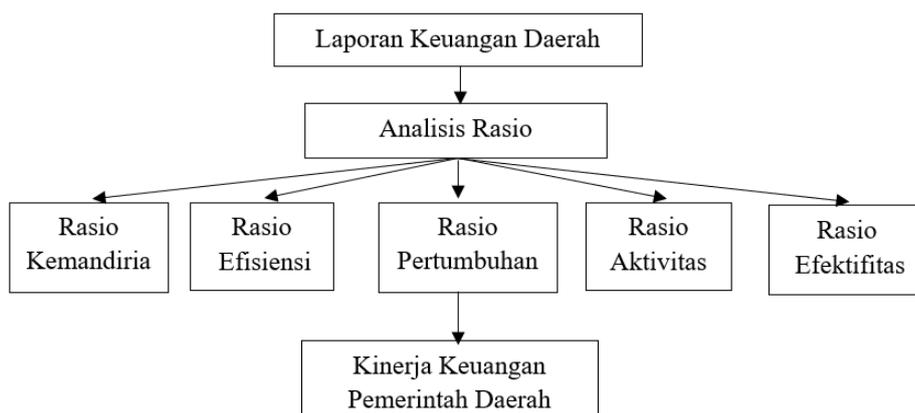
				<p>Rasio efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan.</p> <p>Rasio aktifitas/rasio keserasian dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut.</p> <p>Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kota Surakarta. Sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta memperbaiki 4 rasio yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan.</p>
8	Sunata (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan .	Penelitian ini menekankan ada atau tidak ada perbedaan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang diuraikan oleh Kemandirian Keuangan Daerah Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan	Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan Kinerja dalam hal kemandirian keuangan daerah, desentralisasi dan efisiensi di Jawa Tengah dan Selatan Provinsi Kalimantan. Sementara itu, rasio efektivitas tidak menunjukkan perbedaan antara kedua wilayah.

			Efektivitas Pendapatan Asli Antara Jawa Tengah dan Kalimantan selatan	
9	Fathah (2017)	Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Penelitian ini menggunakan analisis : Rasio efektivitas PAD, Rasio efisiensi keuangan daerah, Rasio kesesuaian Rasio pertumbuhan Rasio independensi keuangan daerah	Hasil penelitian ini adalah: Efektivitas Rasio PAD dapat dianggap efektif, karena efektivitas rata-rata sebesar 131,8% . Rasio efisiensi keuangan daerah yang diklasifikasikan sebagai tidak efisien sejak besaran rata- rata rasio ini di 109,8%. Rasio kesesuaian dapat dikatakan bahwa kabupaten gunung kidul mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk area pengeluaran operasi yang rata-rata 71,26% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal 9,92%. Rasio pendapatan pertumbuhan, pendapatan, pengeluaran operasional selalu meningkat dari tahun ke tahun dan belanja modal pertumbuhan volatile Rasio independensi keuangan masih tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rasio rata-rata 10%.
10	Morasa, Dkk (2017)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan	Analisis rasio keuangan dengan menghitung rasio independensi,	Hasil penelitian bahwa pola hubungan tingkat otonomi daerah di Kota Manado adalah kriteria instruktif. Tingkat

		Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015	desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pengeluaran	desentralisasi fiskal masih kurang, tetapi Rasio efektivitas sangat efektif dan rasio efisiensi juga sangat efisien. Rasio kongruensi pengeluaran menunjukkan keseimbangan antara pengeluaran tidak seimbang. Berdasarkan perhitungan dan analisis kemampuan keuangan daerah dapat menyimpulkan, bahwa kondisi kemampuan finansial Kota Manado masih belum ideal. Bagikan dan Hasil perhitungan pertumbuhan, posisi Kota Manado berada di kuadran II dan Indeks Kapabilitas Kota Manado tinggi.
--	--	--	---	---

Sumber : Dari berbagai sumber (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir